



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ILHAM NURHIDAYAT
2. Jabatan : AUDITOR MADYA
3. NHK : 621629

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m²/155 m² di KOTA YOGYAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Tanah Seluas 2850 m² di NGAWI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA LIPAT MEREK DAHON SELI Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. LAINNYA, SEPEDA LIPAT MEREK FNHON SELI Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 101.121.421**F. HARTA LAINNYA** Rp. 65.750.000

Sub Total Rp. 1.868.871.421

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.868.871.421

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.